

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

*Coronavirus disease 2019* (Covid-19) tidak hanya memengaruhi bidang kesehatan global tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Dalam upaya meminimalisasi penyebaran virus yang begitu cepat, pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan sosial yang mana membuat aktivitas masyarakat turut terbatas. Dari sektor ekonomi sendiri, pembatasan aktivitas ini menyebabkan sejumlah bidang usaha swasta tidak lagi mampu beroperasi normal sehingga perusahaan perlu beradaptasi dengan kondisi terkini. Adapun hal-hal yang dilakukan seperti mengurangi gaji pegawai bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja akibat terancam bangkrut.

Kementerian Ketenagakerjaan telah mencatat terdapat 1.500.156 pekerja sektor formal dan 443.760 pekerja sektor informal terkena PHK<sup>1</sup>. Akibat dari ketidakmampuan perusahaan atau bidang usaha mandiri lainnya dalam membuka lapangan kerja akhirnya memperbesar jumlah pengangguran dan turut memengaruhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, pandemi Covid-19 telah memperkecil kesempatan kerja sehingga menimbulkan masalah sosial<sup>2</sup>.

Ketika masyarakat tidak lagi mampu mendapatkan penghasilan, keperluan individu yang menjadi tanggungannya akan sulit terpenuhi. Permasalahan ekonomi

---

<sup>1</sup> Indah Budiati et al., *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021 Welfare Indicators* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hal. 49.

<sup>2</sup> Ibid. hal. 13.

yang sejak dulu belum teratasi, semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Ditambah lagi, permasalahan kemiskinan dan kelaparan yang juga semakin meningkat. Badan Pusat Statistik dalam laporannya memaparkan, terjadi kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode Maret 2020-Maret 2021 dari 0,25 menjadi 0,31 di perkotaan sedangkan di perdesaan dari 0,55 menjadi 0,57<sup>3</sup>. Dari data ini menunjukkan rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial<sup>4</sup>. Berdasarkan KBBI V Daring, negara berarti kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya<sup>5</sup>. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengurus negara, khususnya Kementerian Sosial. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial menyatakan, tugas Kemensos yaitu menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanganan fakir miskin untuk

---

<sup>3</sup> Nuri Taufiq et al., *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021, Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hal. 17.

<sup>4</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "Kesejahteraan Sosial," *Dpr.Go.Id*, last modified 2009, accessed March 23, 2022, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/528>.

<sup>5</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring," *Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*, last modified 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara>.

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan inklusivitas<sup>6</sup>.

Sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial masyarakat, Kemensos mengeluarkan kebijakan bantuan sosial. Kebijakan pemberian bansos ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Kementerian Sosial memiliki tiga program bansos, yaitu: 1) Program Keluarga Harapan (PKH), 2) Program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako/BNPT Non-PKH, dan 3) Bansos Beras (BSB)<sup>7</sup>. Bantuan sosial pandemi Covid-19 mulai didistribusikan pada April 2020. Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial kepada 1,2 juta masyarakat di DKI Jakarta berupa bahan pokok senilai Rp600.000. Kemudian, secara bertahap didistribusikan ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan lainnya.

Dalam penyaluran bansos tahap pertama, Menteri Sosial Republik Indonesia yakni Juliari P. Batubara mengaku belum berjalan lancar akibat tidak validnya data<sup>8</sup>. Namun, problematika bansos Kemensos tidak hanya sampai pada ketidakvalidan data. Pada masa pendistribusian masyarakat menerima paket sembako yang dinilai tidak layak. Contohnya, yang ramai diperbincangkan warganet yaitu komposisi produk sarden lebih banyak mengandung air daripada

---

<sup>6</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Tugas & Fungsi," *Kemensos.Go.Id*, last modified 2019, accessed April 20, 2022, <https://kemensos.go.id/tugasfungsi#:~:text=Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46,untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan>.

<sup>7</sup> Retia Kartika Dewi, "Tiga Bantuan Sosial Yang Disalurkan Kemensos Pada 2020," *Kompas.Com*, last modified 2020, accessed March 23, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/06/130536565/tiga-bantuan-sosial-yang-disalurkan-kemensos-pada-2020?page=all>.

<sup>8</sup> Rakhmat Nur Hakim, "Mensos Targetkan Bansos Tunai Tahap Kedua Tersalurkan Sebelum Lebaran," *Kompas.Com*, last modified 2020, accessed March 23, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/15425021/mensos-targetkan-bansos-tunai-tahap-kedua-tersalurkan-sebelum-lebaran>.

daging. Oleh karena dibicarakan secara massal dan menjadi polemik akhirnya muncul banyak dugaan terkait kelayakan dan ketidaksesuaian harga dengan yang dijanjikan.

Pada 5 Desember 2020, akhirnya kecurigaan masyarakat terkait paket sembako bansos Covid-19 menemukan jawaban setelah dijalankannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Program bansos yang dijalankan pemerintah untuk kesejahteraan sosial masyarakat menjadi celah praktik korupsi. Kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Mensos Juliari ini mendapatkan atensi besar masyarakat dan menjadi tajuk utama pemberitaan media massa seperti yang dilakukan media Tempo.co dan Krjogja.com.

Berbicara mengenai media massa, eksistensinya telah dirasakan sejak tahun 1920-an. Media massa yang juga kerap kali disebut sebagai pers ini bertujuan untuk membuat dan mendistribusikan informasi baik secara cetak maupun elektronik<sup>9</sup>. Adapun seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, media massa mulai menggunakan jejaring internet sebagai wadah pendistribusian berita. Kecenderungan masyarakat terhadap penggunaan ponsel pintar juga memicu kemunculan banyaknya media massa atau pers siber yang mendistribusikan informasi melalui jejaring internet. Oleh karena kemudahan akses dan kecepatan dalam pendistribusian berita, pers daring banyak diakses masyarakat untuk mengikuti atau mendapatkan informasi mutakhir. Begitu juga dengan berita mengenai kasus korupsi bansos Covid-19 yang tidak luput dari perhatian pers.

---

<sup>9</sup> Defita Wulansari, *Media Massa Dan Komunikasi* (Semarang: Mutiara Aksara, 2021). hal. 2.

Dalam melakukan pekerjaannya, pers memiliki kode etik yang harus ditaati. Adapun hal ini telah tertuang dalam 11 butir Kode Etik Jurnalistik yang antara lain mengharuskan pers bersikap netral dan objektif serta mengolah berita secara akurat dan berimbang<sup>10</sup>. Namun mengacu pada observasi awal ditemukan sebuah peristiwa dapat diberitakan secara berbeda dan terindikasi adanya keberpihakan. Pers melakukan berbagai strategi framing berupa penekanan atau penghilangan agar berita yang disampaikan sejalan dengan yang mereka kehendaki. Pers sebagai kekuatan keempat di bawah lembaga kekuasaan negara sering kali ditunggangi oleh pemegang kekuasaan, bahkan elit politik memiliki pers tersendiri yang digunakan untuk melancarkan aksinya<sup>11</sup>.

Tempo.co merupakan versi digital dari surat kabar Tempo yang dirilis pada tahun 1995 dan menjadi salah satu pionir portal berita *online* di Indonesia. Menilik sejarahnya, pada 1994 pemerintah mencabut izin Tempo karena dianggap membahayakan stabilitas nasional setelah memberitakan dugaan korupsi impor kapal Jerman Timur yang melibatkan Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie. Oleh karena itu, pandangan publik terhadap Tempo adalah media yang kritis terhadap pemerintah. Dalam proses jurnalistiknya, Tempo menetapkan standar tinggi, berprinsip membuat tulisan yang diperlukan masyarakat, dan mampu beradaptasi dengan beragam karakteristik audiensnya. Tempo.co berpusat di Jakarta dan termasuk ke dalam media nasional.

---

<sup>10</sup> Theresia Romaito Sihombing, "Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lex Et Societatis* VIII, no. 2 (2020): 141–149, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/28499/27851>. hal. 143.

<sup>11</sup> Asep Saeful Muhtadi, *Pengantar Ilmu Jurnalistik*. hal. 34.



Dalam susunan redaksi Tempo.co, pada urutan teratas diduduki oleh Direktur Utama yaitu Wahyu Dhyatmika. Beliau menjadi anggota *International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)* dan menjadi salah satu representasi jurnalis Indonesia dalam investigasi kasus penggelapan pajak *offshore company*, Mossack Fonseca. Kasus ini dikenal dengan nama *The Panama Papers*. Dari investigasi yang dilakukan ditemukan adanya 899 individu dan perusahaan di Indonesia, termasuk di dalamnya nama pemerintah yang terlibat yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan<sup>12</sup>. Dari temuan tersebut, memunculkan hipotesis bahwa Tempo.co tidak segan untuk membeberkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pemerintah. Oleh karena itu, Tempo.co mendapatkan kepercayaan organisasi global untuk bergabung dalam forum investigasi. Tempo.co memiliki prinsip enak dibaca dan perlu serta jenaka dalam memberitakan peristiwa.

Sedangkan, Krjogja.com merupakan portal berita dari surat kabar harian cetak Kedaulatan Rakyat yang berpusat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat kabar Kedaulatan Rakyat merupakan media tertua di Indonesia yang masih beroperasi hingga saat ini. Kedaulatan Rakyat didirikan pada 27 September 1945 dan merilis portal berita *online* Krjogja.com pada 1 Juni 2009. Krjogja.com memuat rubrik berita yang beragam. Berbeda dengan Tempo.co yang banyak diketahui publik secara nasional, Krjogja.com lebih dikenal oleh masyarakat daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dikutip dari situs webnya, Kedaulatan Rakyat

---

<sup>12</sup> Tata Ferliana, "Petinggi Negara Di 3 Dokumen Skandal Pajak: Pandora, Panama Dan Paradise Papers," *Tempo.Co*, last modified 2021, accessed April 12, 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1515059/petinggi-negara-di-3-dokumen-skandal-pajak-pandora-panama-dan-paradise-papers/full&view=ok>.

dinobatkan sebagai media lokal dengan audiens terbanyak berdasarkan survei nasional dan berprinsip memberitakan informasi secara cepat dan mendalam.

Perbedaan audiens, sejarah, kantor pusat, dan prinsip dari Tempo.co dan Krjogja.com melatarbelakangi digunakannya kedua media tersebut sebagai objek penelitian. Perbedaan-perbedaan tersebut juga menunjukkan perbedaan kedua media dalam melakukan strategi framing. Analisis framing terhadap kasus korupsi bansos Covid-19 ini dilakukan karena informasi atau berita yang disajikan bersinggungan dengan banyak pihak, merugikan masyarakat luas, dan berkaitan dengan aspek kemanusiaan sejalan dengan pandangan konstruksionis<sup>13</sup>.

Korupsi bantuan sosial pandemi Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan perampasan hak masyarakat. Ironinya, pendanaan yang dikeluarkan untuk kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat malah dimanipulasi oleh Menteri Sosial sendiri yang memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi Kementerian Sosial. Lebih-lebih lagi, korupsi dilakukan pada masa pandemi Covid-19 di mana terjadi peningkatan jumlah pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan.

Penelitian ini bukan hanya melihat aspek bahasa dalam lingkup komunikasi. Namun, juga melihat bagaimana fungsi bahasa yang digunakan dalam melakukan penekanan dan pemfokusan yang dilakukan media untuk memberikan pemahaman tertentu kepada pembaca. Oleh karena itu, analisis dilakukan menggunakan model

---

<sup>13</sup> Kheyene Molekandella Boer, Mutia Rahmi Pratiwi, and Nalal Muna, "Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial Dan Pemerintah Terkait Covid-19 Di Media Online," *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 4, no. 1 (2020): 85–104, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/view/8277>. hal 87-88

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki karena perangkat analisis yang diuraikan paling sesuai dan dekat dengan ilmu linguistik.

Uraian di atas menjadi latar belakang dilakukannya penelitian berjudul “Framing Terhadap Korupsi Bansos Covid-19 di Media Tempo.co dan Krjogja.com”. Objek penelitian digunakan karena adanya perbedaan mencolok dari kedua jenis media yaitu nasional dan lokal sehingga nantinya juga akan dilakukan perbandingan bagaimana keduanya melakukan framing terhadap kasus korupsi bansos Covid-19. Dengan dilakukannya analisis lebih dalam, diharapkan mampu membuktikan pernyataan, bukan hanya memberikan asumsi semata. Untuk menguraikan hasil penelitian digunakan metode deskriptif kualitatif.

### **1.2 Fokus dan Subfokus**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penelitian ini berfokus pada framing media *online* Tempo.co dan Krjogja.com terhadap korupsi bansos Covid-19. Kemudian, subfokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Tempo.co melakukan framing terhadap korupsi bansos Covid-19.
2. Bagaimana Krjogja.com melakukan framing terhadap korupsi bansos Covid-19.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Bagaimana framing pemberitaan yang dilakukan terhadap korupsi bansos Covid-19 di media daring Tempo.co dan Krjogja.com?



## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu menguraikan bagaimana framing pemberitaan korupsi bansos Covid-19 di media Tempo.co dan Krjogja.com.

Kemudian, secara khusus dilakukan untuk menguraikannya melalui analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan tujuan berikut.

1. Menguraikan bagaimana struktur sintaksis berita korupsi bansos Covid-19 di media Tempo.co dan Krjogja.com.
2. Menguraikan bagaimana struktur skrip berita korupsi bansos Covid-19 di media Tempo.co dan Krjogja.com.
3. Menguraikan bagaimana struktur tematik berita korupsi bansos Covid-19 di media Tempo.co dan Krjogja.com.
4. Menguraikan bagaimana struktur retorik berita korupsi bansos Covid-19 di media Tempo.co dan Krjogja.com.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, melalui penelitian yang dilakukan ini peneliti berharap mampu menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam pengembangan disiplin ilmu linguistik dan komunikasi, khususnya analisis framing. Selain itu, juga dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai framing pemberitaan yang dilakukan oleh media *online*.
2. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini dapat menambah bahan bacaan dan mengedukasi agar tidak menelan mentah tiap pemberitaan yang diberitakan oleh media.

